



Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) Pada Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

As'adi^{1*}, Yayuk Sulistiyowati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Tribhuwana Tungadewi

*Koresponden author: asadi110390@gmail.com

Abstract

This study aims to test how the Sidoarjo Sludge Control Center applies the Accrual-Based Accounting Application System (SAIBA) in the preparation of financial statements. Research is a type of qualitative research with methods, namely: summarizing, choosing the main things, focusing on important things, looking for themes and patterns and discarding unnecessary (data reduction), displaying data or commonly referred to as presenting data, drawing conclusions and verification. Results and discussion: The Sidoarjo Sludge Control Center Work Unit has implemented the SAIBA application to prepare financial statements in accordance with the following excerpts of interviews with SAIBA operators: Since PPLS was established in 2017, we have implemented SAIBA to prepare financial statements. The preparation of financial statements using SAIBA is in accordance with applicable regulations, because SAIBA has accommodated current regulations, both from the Minister of Finance and Government Regulations. In the application of the SAIBA application, obstacles were found, namely the difference between journals formed by SIMAK BMN and MAK capital expenditure as conveyed by the SIMAK BMN Operator that journals formed by SIMAK BMN were often incompatible type of MAK capital expenditure, Road, Irrigation and Network (JII) expenditure becomes Equipment and Machinery or Building Assets so that it appears that the BMN transaction journal has not been adjusted. Conclusion: The Sidoarjo Sludge Control Center Work Unit has implemented the SAIBA application well in preparing its financial statements in accordance with government accounting standards.

Keywords: Government Accounting Standards; Application System Integration; Accrual-Based Agency Accounting System (SAIBA)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menerapkan Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yaitu : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (reduksi data), menampilkan data atau biasa disebut dengan penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dan diskusi: Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo telah menerapkan aplikasi SAIBA untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan wawancara dengan operator SAIBA berikut : Sejak PPLS dibentuk Tahun 2017 kami sudah menerapkan SAIBA untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAIBA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena SAIBA sudah mengakomodasi peraturan-peraturan yang sedang berlaku, baik dari Menteri Keuangan maupun Peraturan Pemerintah. Dalam penerapan aplikasi SAIBA, ditemukan kendala yaitu adanya perbedaan jurnal bentukan SIMAK BMN dengan MAK belanja modal seperti yang disampaikan oleh Operator SIMAK BMN bahwa jurnal bentukan SIMAK BMN yang sering tidak sesuai dengan jenis MAK belanja modalnya, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (JII) menjadi Aset Peralatan dan Mesin atau Gedung sehingga muncul jurnal transaksi BMN belum disesuaikan. Kesimpulan: Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo telah menerapkan aplikasi SAIBA dengan baik dalam penyusunan laporan keuangannya yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Integrasi; SAIBA



PENDAHULUAN

Perubahan besar yang terjadi pada sektor publik menuntut adanya tatanan baru akan sistem akuntansi dan informasi (Pettersen et al., 2011);(Hoque et al., 2001). Pentingnya sistem akuntansi dan informasi yang tepat agar memberikan dampak positif untuk menata pemerintah dengan baik. Beberapa tahun belakangan ini, organisasi sektor publik banyak mengadopsi sistem *Accrual Basis* terutama di negara berkembang (Agasisti et al., 2015).

Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik supaya tercipta birokrasi yang efektif, bersih dan efisien. Birokrasi di Indonesia terinspirasi pada masa orde baru banyak menurut prinsip birokrasi Weber (Haryanto, 2007). Masyarakat menuntut suatu negara yang menjalankan sistem pemerintah yang transparan serta akuntabel sesuai organisasi internasional yang berlaku. Organisasi internasional memberikan suatu sistem yang kuat untuk mendorong negara-negara di dunia agar mengubah sistem akuntansi sektor swasta dari basis kas menjadi basis akrual. *International Monetary Fund (IMF)* maupun Bank Dunia mendorong perubahan sistem pencatatan dari akrual basis menjadi kas basis (Hassan, 2015). Sistem akuntansi pemerintah Indonesia pun terkena dampak tuntutan dari masyarakat internasional tersebut. Konsep tata kelola yang cukup baik atau biasa disebut dengan *good governance* memberikan perubahan kelembagaan dan inisiatif pengembangan sebuah pemerintahan yang saat ini dianggap penting untuk pembangunan (Grindle, 2011).

Mewujudkan tata pengelolaan pemerintah yang baik (*Good Governance*), perlu disusun regulasi agar mampu memperkuat parameter, sistem, sumber daya aparatur dan organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 yang diterbitkan pada tahun 2010, menginstruksikan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual secara murni, tetapi pada tahun yang sama masih terdapat kelonggaran atas penerapan basis kas sampai dengan Tahun 2015, harapan dari pemerintah pusat maupun daerah pada saat itu dapat menerapkan basis akrual secara penuh. Terdapat perbedaan yang sangat penting dari akuntansi pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual yang ditunjukkan oleh laporan operasional (LO). Penyajiannya bahwa sumber daya ekonomi yang dapat menambah jumlah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama periode pelaporan (Mu'am, 2015).

Akuntansi akrual bagi sektor publik dan manajer keuangan daerah dapat memberikan informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan internal di pemerintah daerah (Ferryono et al., 2016). Akuntansi akrual mencatat beban pada saat transaksi terjadi dapat dianggap memberikan gambaran kegiatan operasional pemerintah yang transparan. Selain itu, informasi yang disediakan memungkinkan adanya kualitas manajemen yang lebih baik. Metode akrual basis berupa informasi yang berkualitas daripada metode lainnya (Ferryono et al., 2016).

Pemerintah pusat menerapkan *Integrated Application System* dalam penerapan SAP kas berbasis akrual yaitu memadukan semua proses budgeting, implementation, dan reporting pada Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga sehubungan dengan pengelolaan APBN. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual dapat dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. Penggunaan aplikasi juga digunakan dalam sektor pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya. Sebuah sistem juga diperlukan di sektor pemerintahan, sebab suatu instansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Jorge de Jesus et al., 2012). Pada sektor pemerintahan, aplikasi memegang peranan penting



seperti halnya yang diterapkan oleh sektor swasta. Setiap Instansi diharapkan dapat bekerja dengan meningkatkan kualitas layanan publik, di samping suatu instansi juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya dengan harapan untuk setiap anggaran yang diserap digunakan untuk kegiatan operasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui penerapan sistem informasi dapat memudahkan maupun mengurangi kesalahan - kesalahan yang terjadi dalam menyusun laporan keuangan.

Sistem informasi akuntansi terdiri dari komponen - komponen yang terkait yang dapat bekerja sama mengumpulkan dan menyimpan serta menyebarkan data dengan untuk tujuan untuk merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan, menganalisis bahkan untuk pengambilan keputusan (Soudani, 2012). Dengan menggunakan aplikasi terintegrasi secara komputerisasi yang dapat mengolah data akuntansi sudah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap instansi pemerintah. Hal ini dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengetikan, menjumlahkan bahkan mengklarifikasi sebuah akun dapat diminimalisir sehingga informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan lebih akurat dan valid. Melalui informasi yang valid dan akurat dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tidak bias (Margareth, 2020). Informasi yang dihasilkan laporan akrual sejatinya bukan suatu kebutuhan penting, sistem tersebut memiliki kecenderungan yang sulit untuk diterapkan. Mengacu pada pemerintahan Sumenep, kebutuhan sumber daya manusia yang penting untuk disiapkan, hal ini menjadi pertanyaan bagi kita terkait manfaat dari penerapan sistem informasi akrual dan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Proses penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara rinci, lebih kehati-hatian serta perlunya ketelitian untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan yang tidak handal (Gailly et al., 2014). Banyak peneliti mengakui dampak positif yang diperoleh atas penerapan akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi berbasis akrual. Seperti manfaat akrual basis di Rumania sebagai standar ekonomi yang sedang dikembangkan. Keuntungan transisi sistem akuntansi di Rumania dari berbasis tunai ke basis akrual dalam dua tahap yang dianalisis, periode transisi dan pasca reformasi. Ini membuktikan korelasi antara kecepatan perubahan regulasi dan penerapannya dalam praktik, secara tidak langsung mengkonfirmasi orientasi pembuat standar Rumania yaitu *International Public Sector Accounting* dan akuntansi akrual (Deaconu et al., 2011). Mayoritas pemerintah daerah dan pusat menerapkan akuntansi akrual dengan mengabaikan *International Public Sector Accounting*. Akuntansi akrual dapat menjelaskan laporan keuangan yang transparansi dan efisiensi (Christiaens et al., 2010).

Dengan penggunaan akrual basis, pemerintah bisa melakukan beberapa keputusan penganggaran (Poljašević et al., 2019). Sistem akuntansi terpadu dan berkelanjutan terdapat pada sistem akuntansi yang berbasis akrual. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah instansi dalam menerapkan akuntansi yang berbasis akrual, di antaranya adalah tingkat pendidikan staf dan pelatihan. Kompeten tidaknya sumber daya manusia yang dimiliki dapat mempengaruhi penerapan standar akuntansi yang berbasis akrual berbeda dengan penggunaan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras belum tentu berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, tetapi penyusunan akuntansi secara manual dapat berpengaruh terhadap penerapan standar pemerintahan berbasis akrual. akuntansi standar berbasis akrual (Yahya et al., 2018). Sistem Akuntansi yang Berbasis Akrual, penerapan teknologi informasi serta sistem pengendalian intern dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal



ini menekankan pada kompetensi sumber daya manusia yang mampu untuk memperkuat keberhasilan dalam penerapannya (Agustiawan et al., 2016).

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) adalah sebuah instansi yang dibentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2017 untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibubarkan berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2017. Mengacu pada peraturan menteri instansi merupakan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintahan. Untuk itu setiap transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dengan ini pentingnya penyusunan laporan keuangan yang tepat. Perlunya setiap pihak untuk mengetahui bagaimana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menerapkan Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA)

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik maupun data statistik. Penelitian kualitatif adalah model penelitian humanistik yang mana sumber daya manusia dijadikan sebagai subjek utama (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada operator SAIBA, operator SIMAK-BMN, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan Penyusun Rencana Program dan Anggaran.

Penelitian deskriptif kualitatif berupa uraian pendapat yang disampaikan responden terkait informasi tentang kebutuhan peneliti berdasarkan pertanyaan yang di susun pada angket yang kemudian hasil informasi tersebut dianalisis. Penelitian saat ini menggunakan tiga tahap analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020):

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SAIBA

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo terkait penerapan SAIBA didapatkan hasil yaitu : Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo telah menerapkan aplikasi SAIBA untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan petikan wawancara dengan operator SAIBA berikut : Sejak PPLS dibentuk Tahun 2017, kami sudah menerapkan SAIBA untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan SAIBA sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena SAIBA sudah mengakomodasi peraturan-peraturan yang sedang berlaku, baik dari Menteri Keuangan maupun Peraturan Pemerintah.

Operator maupun bendahara selalu meng-update peraturan maupun aplikasi versi terbaru agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo tidak menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas sebagaimana petikan wawancara berikut: CaLK kan kondisional pak, sesuai dengan keadaan satker masing-masing. Tapi kabarnya ada semacam aplikasi yang dipakai untuk mempermudah penyusunan CaLK, adapun laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas itu hanya milik Kementerian Keuangan, satker-satker selain Kementerian Keuangan tidak membuat laporan

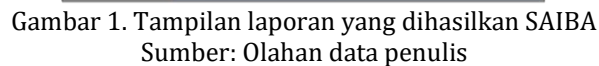


tersebut. Kualifikasi operator SAIBA yang baik adalah harus berbasis akuntansi atau yang mau memahami akuntansi sedangkan kualifikasi operator SIMAK BMN adalah orang yang mampu menelaah substansi dari hasil transaksi belanja modal yang menghasilkan aset tetap, karena kaidah PSAP aset tetap adalah substansi mengungguli bentuk. Latar belakang pendidikan kedua operator tersebut adalah Akuntansi dan Ekonomi.

Operator SAIBA mengatakan bahwa kualifikasi operator SAIBA adalah operator yang berbasis akuntansi atau yang mempunyai keinginan mempelajari akuntansi. Sementara dari operator SIMAK BMN mengatakan yang mampu menelaah substansi dari hasil transaksi belanja modal yang menghasilkan aset tetap, karena kaidah PSAP aset tetap adalah substansi mengungguli bentuk. Jumlah operator SAIBA dalam setiap satker cukup 1 (satu) orang saja dikarenakan hanya meng-input backup data berupa ADK (Arsip Data Komputer) dari aplikasi SAS dan SIMAK BMN kecuali jika ada permasalahan, maka dilakukan *manual entry*.

Peneliti mendapatkan keterangan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi SAIBA. Ada pun kelebihan dari aplikasi SAIBA yaitu: 1) Memudahkan peng-entry-an data sekaligus rekonsiliasi internal dan menampilkan laporan keuangan akurat; 2) Meminimalisasi human error; 3) Efisiensi sumber daya manusia. Kekurangan dari aplikasi SAIBA adalah: 1) Aplikasi SAIBA masih memerlukan update untuk memperbarui fitur yang dimiliki agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. 2) Aplikasi SAIBA dapat menimbulkan ketergantungan terhadap aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam penerapan aplikasi SAIBA, peneliti menemukan kendala yaitu adanya perbedaan jurnal bentukan SIMAK BMN dengan MAK belanja modal seperti yang disampaikan oleh Operator SIMAK BMN bahwa jurnal bentukan SIMAK BMN yang sering tidak sesuai dengan jenis MAK belanja modalnya, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (IJ) menjadi Aset Peralatan dan Mesin atau Gedung sehingga muncul jurnal transaksi BMN belum disesuaikan. Di samping hal tersebut, apabila terjadi kendala pada salah satu aplikasi pendukungnya, maka laporan yang dihasilkan SAIBA menjadi terhambat karena tidak bisa meng-import ADK dari aplikasi tersebut.

Penerapan Aplikasi SAIBA pada Satker PPLS telah dilakukan sejak PPLS didirikan pada tahun 2017. PPLS merupakan instansi yang melanjutkan tugas dan kewenangan serta mendapatkan mutasi aset dari BPLS. Hal ini merupakan suatu kewajiban PPLS untuk melanjutkan sistem pelaporan keuangan dari BPLS dengan menerapkan aplikasi SAIBA dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Namun, Satker PPLS hanya menghasilkan laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. CaLK tidak disusun padahal merupakan suatu laporan kondisional, menyesuaikan dengan keadaan satker masing-masing dan ada aplikasi sendiri yang dipakai untuk mempermudah penyusunan CaLK. Adapun laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas itu hanya milik Kementerian Keuangan, satker-satker selain kementerian keuangan tidak membuat laporan.



Gambar 2. Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Satker PPLS
Sumber: Olahan data penulis

Gambar 3. Tampilan Neraca Satker PPLS
Sumber: Olahan data penulis

| 87

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMPURN DENGAN 31 Desember 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 001 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI : 001 DITJEN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH/KORPORASI : 0000 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : 302011 PUSAT PENGELOLAAN LUMPUR SEDERAJUD
JENIS KEMERANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kerugian (Penurunan)
	2019	2018	
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERALAMAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengeluaran Barang Kena Pajak	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0
Pendapatan Pajak Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0
Jumlah Pendapatan Persepsi	0	0	0

Gambar 4. Tampilan Laporan Operasional Satker PPLS
Sumber: Olahan data penulis

Terjadinya kenaikan atau penurunan posisi ekuitas pada Tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menggambarkan posisi ekuitas awal, surplus atau defisit laporan operasional, dampak kumulatif atas terjadinya perubahan kebijakan bidang akuntansi, terjadinya transaksi antar entitas, kenaikan atau penurunan laporan ekuitas. Selain itu juga memberikan informasi perbandingan dengan laporan Tahun Anggaran 2022.

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SEMPURN DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 001 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT ORGANISASI : 001 DITJEN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH/KORPORASI : 0000 JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : 302011 PUSAT PENGELOLAAN LUMPUR SEDERAJUD
JENIS KEMERANGAN : KP KANTOR PUSAT

URAIAN	JUMLAH		Kerugian (Penurunan)
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	
EKUITAS AWAL	4,493,646,277,722	0	4,493,646,277,722
SURPLUS/DEFISIT - 101	(286,496,474,190)	286,246,282,276	1,743,824,194
KORSEKSI YANG MENYAMPAIKAN/BERGANGSI EKUITAS	607,348,588	148,775,588	458,573,000
YANG ANTARA LAIN BERAKAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN NEGASAR AKUNTANSI SALAH SAHAJA MENYAKSI			
Perubahan Nilai Awal	0	0	0
Korupsi Nilai Perolehan	0	0	0
Korupsi Nilai Perolehan	607,348,588	0	607,348,588
Salah Revisi Awal Tetap	0	0	0
Korupsi Nilai Awal Tetap/Laporan Revisi	0	148,775,588	(148,775,588)
Korupsi Lain-lain	0	0	0
TRANSASI ANTAR ENTITAS	317,894,088,361	4,887,709,883,412	4,569,815,795,051
KERUKUNAN PERUBAHAN EKUITAS	112,695,466,581	4,493,646,277,722	4,380,950,811,141

Gambar 5. Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas Satker PPLS
Sumber: Olahan data penulis

Informasi yang diperoleh dari operator baik operator SAIBA, SAS maupun SIMAK BMN memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan akuntansi sehingga memudahkan memahami pengoperasian aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Operator telah mengikuti berbagai pelatihan tentang aplikasi yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memahami proses perekaman dan input data yang kemudian diproses menjadi laporan keuangan. Kesalahan klasifikasi dalam pelaporan keuangan yang dihasilkan dari kesalahan perekaman data akan membuat laporan keuangan menjadi tidak berguna. Dalam proses perekaman data, aplikasi ini mengimpor data dari aplikasi SIMAK BMN untuk data aset dan aplikasi SAS untuk meng-import data anggaran.

Mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi SAIBA yaitu : 1) meminimalisasi *human error*. Saat ini, terjadinya transaksi diakui semakin bertambah tinggi, dengan nilai transaksi yang semakin banyak namun tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki instansi selain jumlah yang tidak seimbang pada hakikatnya manusia rentan terhadap tekanan, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat tekanan tersebut. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif apabila sistem manual digunakan secara



terus menerus untuk memproses transaksi-transaksi tersebut karena dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam memasukan data dan untuk mengklasifikasikan data-data transaksi. Dengan adanya aplikasi ini, kesalahan tersebut bisa diminimalisir.

Pengguna aplikasi ini dapat memproses data yang bersumber dari dari aplikasi lainnya untuk menghasilkan informasi, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memasukan data secara manual untuk transaksi-transaksi tertentu sehingga dapat menghasilkan tingkat keandalan dan akurasi informasi yang tinggi; 2) Efisiensi sumber daya manusia. Dalam satu satker, cukup dibutuhkan hanya 1 orang/operator saja dalam menjalankan aplikasi ini. Operator hanya perlu mengikuti pelatihan tentang tata cara pengoperasian aplikasi SAIBA; 3) Proses pengolahan dan pelaporan yang cepat dan akurat. Aplikasi SAIBA memudahkan pengentryan data sekaligus rekonsiliasi internal dan menampilkan laporan keuangan yang akurat. Laporan keuangan yang cepat dan akurat dapat dijadikan sebagai pertimbangan keputusan karena ada di saat dibutuhkan. Keterlambatan pengambilan keputusan dapat membuang kesempatan yang seharusnya dapat diraih.

Kekurangan Aplikasi SAIBA masih memerlukan *update* untuk memperbarui fitur yang dimiliki dengan tujuan untuk penyesuaian dengan teknologi informasi lainnya guna memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan PPLS. Sebuah aplikasi/sistem akan berevolusi mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhannya untuk menemukan bentuk terbaiknya (Feies et al., 2012). Aplikasi SAIBA memberi kemudahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun di sisi lain, akan timbul ketergantungan terhadap aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan. Jika operator SAIBA tidak memiliki pengetahuan tentang akuntansi, maka hal ini akan mempersulit bagi operator untuk melacak kesalahan dalam pelaporan keuangan. Jurnal bentukan SIMAK BMN yang sering tidak sesuai dengan jenis MAK belanja modalnya, belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) menjadi Aset Peralatan dan Mesin atau Gedung sehingga muncul jurnal transaksi BMN belum disesuaikan. Sebagai solusinya, dibuatlah jurnal umum untuk menyesuaikan MAK pada SIMAK BMN dan SAIBA.

Aplikasi SAIBA merupakan sebuah aplikasi terintegrasi berupa kumpulan-kumpulan dari beberapa aplikasi yang saling berkaitan. Artinya jika salah satu aplikasi mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi hasil output dari aplikasi lainnya baik dari segi ketepatan maupun kecepatan dalam menyajikan laporan. Sebagai contoh, aplikasi SAIBA memerlukan backup data dari aplikasi SAS untuk meng-update laporan keuangan, akan tetapi aplikasi SAS mengalami kendala dalam backup data pelaporan keuangan, maka aplikasi SAIBA ini pun akan mengalami keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangannya karena tidak ada backup data yang dapat di-import pada aplikasi SAIBA

KESIMPULAN

Infomasi yang diperoleh di satuan kerja pusat pengendalian lumpur sidoarjo tentang penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual yaitu: 1) satuan kerja pusat pengendalian lumpur sidoarjo telah menerapkan aplikasi saiba dengan baik dalam penyusunan laporan keuangannya; 2) laporan yang dihasilkan adalah laporan realisasi anggaran ppls, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca; 3) laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) tidak dihasilkan oleh SAIBA; 4) operator dari aplikasi SAIBA dan simak bmn memiliki latar belakang pendidikan ekonomi - akuntansi, serta telah mengikuti bimtek/pelatihan sehingga dapat menjalankan sistem aplikasi dengan baik; 5) aplikasi SAIBA memiliki kelebihan meminimalisasi human error, efisiensi



sumber daya, pengolahan dan pelaporan yang cepat dan akurat; 6) aplikasi SAIBA memiliki kekurangan yaitu aplikasi SAIBA masih memerlukan update untuk memperbarui fitur yang dimiliki dan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan; 7) kendala yang dihadapi satuan kerja pusat pengendalian lumpur Sidoarjo dalam penerapan SAIBA yaitu jurnal bentukan simak BMN sering tidak sesuai dengan jenis mak belanja modal pada aplikasi SAIBA serta aplikasi SAIBA merupakan sebuah aplikasi terintegrasi yang terdiri dari beberapa aplikasi yang saling terkait dan mempengaruhi.

Mengacu pada hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran berikut : 1) satker PPLS agar lebih meneliti mak belanja modal agar tidak muncul jurnal transaksi bmn belum disesuaikan; 2) perlu dilakukan penambahan personil operator SAIBA dan Simak BMN sebagai *second layer* dan regenerasi agar pembuatan laporan tidak terfokus pada satu orang/operator saja; 3) peneliti selanjutnya, agar memperluas objek penelitian karena dalam pelaporan keuangan masih terdapat aplikasi lainnya seperti silabi (sistem laporan bendahara) yang dikembangkan oleh kementerian keuangan cq. direktorat jenderal perbendaharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasisti, T., Catalano, G., Di Carlo, F., & Erbacci, A. (2015). Accrual accounting in Italian universities: a technical perspective. *International Journal of Public Sector Management*. doi: 10.1108/IJPSM-02-2015-0026
- Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akruial, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2010). Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*. doi: 10.1177/0020852310372449
- Deaconu, A., Nistor, C. S., & Filip, C. (2011). The impact of accrual accounting on public sector management. An exploratory study for Romania. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*.
- Feies, G. C., Virag, N. P., & Mates, D. (2012). Characterization of Accounting Systems of Community Operators of Public Utilities Services. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.020
- Ferryono, B., & Akuntansi, D. J. (2016). MANFAAT BASIS AKRUAL DAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH. In *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Gailly, F., & Geerts, G. L. (2014). Business process modeling: An accounting information systems perspective. In *International Journal of Accounting Information Systems*. doi: 10.1016/j.accinf.2014.08.001
- Grindle, M. (2011). Good Enough Governance. *Development Policy Review*.
- Haryanto, A. (2007). Upaya Menciptakan Birokrasi yang Efisien, Inovatif, Responsif dan Akuntabel. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*.
- Hassan, M. M. (2015). Transformation to More-Accrual-Based Accounting Practices in Indonesian Government. *Journal of International Business Research*.



- Hoque, Z., & Moll, J. (2001). Public sector reform: Implications for accounting, accountability and performance of state-owned entities - An Australian perspective. *International Journal of Public Sector Management*. doi: 10.1108/09513550110395256
- Jorge de Jesus, M. A., & Eirado, J. S. B. (2012). Relevance of accounting information to public sector accountability: A study of Brazilian federal public universities. *Tékhne*. doi: 10.1016/j.tekhne.2012.10.001
- Margareth, T. (2020). Sistem Informsdi Geogrsfis Pengertian Dan Aplikasinya. *Sistem Informasi Geografis Pengertian Dan Aplikasinya*, 1.
- Mu'am, A. (2015). Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*.
- Pettersen, I. J., & Nyland, K. (2011). Reforms and accounting system changes: A study on the implementation of accrual accounting in Norwegian hospitals. *Journal of Accounting and Organizational Change*. doi: 10.1108/18325911111164196
- Poljašević, J., Vašiček, V., & Jovanović, T. (2019). Comparative review of dual reporting in public sector in three south-east European countries. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. doi: 10.1108/JPBAFM-02-2019-0035
- Soudani, S. N. (2012). The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance. *International Journal of Economics and Finance*. doi: 10.5539/ijef.v4n5p136
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods). In Alfabet.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue March).
- Yahya, I., Hasibuan, R. P. S., Torong, Z. B., & Muda, I. (2018). Factors that influence success implementation of government accounting standard (SAP) based on accrual in the government of the districts/cities in North Sumatera Province. *Journal of Management Information and Decision Science*.